

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan Scott (2001), dapat disimpulkan hal-hal berikut, yaitu dalam pilar regulatif pengelolaan Desa Wisata Limbasari telah memiliki dasar hukum melalui Perda No. 1 Tahun 2024 dan dokumen perencanaan pariwisata daerah. Pemerintah daerah aktif melakukan pembinaan dan monitoring, namun penerapan regulasi di tingkat lokal masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kepatuhan penuh dari masyarakat dan pengelola. Dalam pilar normatif, nilai sosial seperti gotong royong dan partisipasi masyarakat terlihat cukup kuat dalam pengelolaan desa wisata. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan promosi dan operasional wisata. Namun, kesadaran dan kontribusi aktif sebagian masyarakat masih bergantung pada momen tertentu dan belum sepenuhnya terstruktur. Lalu dalam pilar kognitif, terdapat pemahaman kolektif mengenai manfaat desa wisata, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, persepsi terhadap kelembagaan seperti BUMDes masih belum sepenuhnya positif. Tantangan juga muncul dari kurangnya keselarasan visi antar aktor dan perbedaan pemahaman peran masing-masing lembaga.

Adapun beberapa hambatan utama kelembagaan meliputi keterbatasan SDM, fasilitas fisik yang belum optimal, konflik internal (terutama di area tertentu seperti Patrawisa), serta lemahnya sinergi antara Pokdarwis, BUMDes,

dan pemerintah desa. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah masih menjadi kendala utama dalam mencapai kemandirian.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat pendampingan kelembagaan, khususnya dalam bentuk pelatihan berkala dan fasilitasi regulasi lokal yang mendukung kolaborasi antar aktor desa wisata.
2. Pengurus Pokdarwis dan BUMDes perlu menyusun standar operasional dan peran yang jelas, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kewenangan.
3. Masyarakat desa didorong untuk lebih aktif terlibat melalui forum dialog rutin, peningkatan literasi pariwisata, dan penguatan kapasitas individu dalam mendukung kegiatan wisata secara mandiri.
4. Keberlanjutan pengelolaan dapat dicapai dengan memperkuat semangat kolektif warga, menanamkan nilai konservasi lingkungan, dan menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas wisata desa.